

ANALISIS VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA TAHUN 1993-2013

Oleh : Nurul Izzah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

ABSTRACT

The government expenditure is the instrument used by the government to increase regional economy. The objective of the research was to analyze the reciprocal correlation of government expenditure with the economy of North Sumatera. The research was quantitative analytic with secondary data with the time series obtained from BPS (Central Bureau of Statistics) of North Sumatera. The data were analyzed by using Vector Autoregression (VAR) analysis with Impulse Response Function (IRF) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). The result of the research, using lag 1, showed that there was the contribution of each variable to the variables themselves and to other variables. The variable which had the most effective influence on the economic growth was government expenditure. The variable economic growth had the most effective influence on government expenditure on long term.

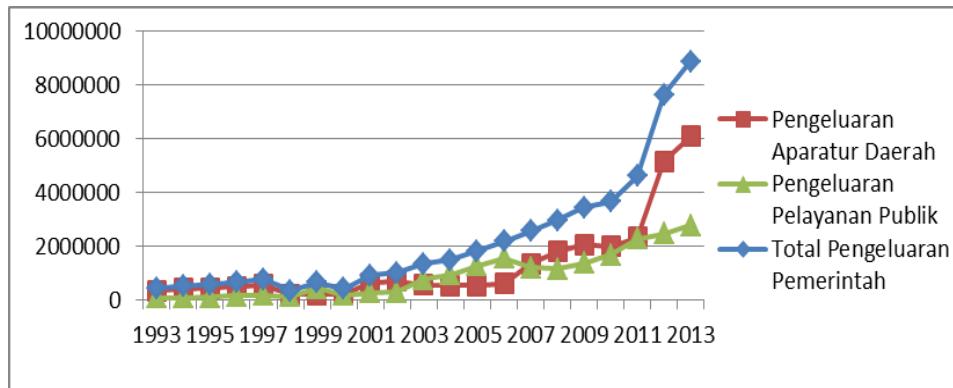
Keywords : Government Expenditure, Economic Growth, Vector Autoregression (VAR).

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal memiliki instrument pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Instrument fiskal dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kebijakan fiskal regional dapat dilihat melalui perkembangan pengeluaran pemerintah. Lebih lanjut mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah daerah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Tren pengeluaran pemerintah daerah Sumatera Utara selama kurun waktu 1993-2013 cenderung mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang negatif dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1998 dan tahun 2000. Hal ini terjadi diindikasikan karena Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998.

Gambar 1 : Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sumatera Utara Tahun 1993-2013



Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS (2013).

Berdasarkan Gambar 1 diatas juga dapat diketahui proporsi pengeluaran pemerintah untuk pengeluaran aparatur daerah dan pengeluaran pelayanan publik. Perkembangan pengeluaran pelayanan publik cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Berbeda dengan pengeluaran aparatur daerah yang mengalami peningkatan sangat tinggi pada tahun 2012 sebesar 121 persen dari tahun sebelumnya.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercermin dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi juga. Perkembangan PDRB Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah berikut.

Tabel 1 : Perkembangan PDRB Sumatera Utara ADH Konstan 2000 Tahun 2001-2013 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB	Pertumbuhan (%)
2001	71.908.359	3.98
2002	75.189.140	4.56
2003	78.805.609	4.81
2004	83.328.949	5.74
2005	87.897.791	5.48
2006	93.347.484	6.20
2007	99.792.273	6.90
2008	106.172.368	6.39
2009	111.559.225	5.07

2010	118.718.903	6.42
2011	126.587.622	6.63
2012	134.463.949	6.22
2013	142.537.120	6.00

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka, 2013.

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa terdapat pertumbuhan PDRB yang sangat kecil pada tahun 2011 yaitu hanya sebesar 3,98 persen, hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM. Kemudian penurunan pertumbuhan PDRB yang cukup besar dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009 pertumbuhan PDRB sebesar 5,07 persen menurun dari tahun sebelumnya. PDRB mengalami penurunan disebabkan menurunnya kontribusi sektor pertanian dari 23,82 persen menjadi 23,77 persen, sektor pertambangan dan penggalian dari 1,22 persen menjadi 1,18 persen dan sektor industri dari 22,89 persen menjadi 22,38 persen. Secara umum penurunan ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM akibat dampak krisis ekonomi global tahun 2008.

Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan timbal balik yang positif. Aliran Keynesian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan Keynesian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat akan mendorong peningkatan permintaan agregat yang diikuti peningkatan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pengeluaran pemerintah dipandang sebagai kekuatan eksogenus yang mengubah output agregat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari pengeluaran pemerintah. Di lain pihak, semakin besar pengeluaran pemerintah suatu negara atau daerah akan semakin besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Sehingga pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

Implikasi kebijakan dari adanya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah adalah pembuatan proyeksi/ perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. Dengan mengasumsikan bahwa hubungan timbal balik tersebut terjadi, maka dalam memproyeksikan anggaran pengeluaran pemerintah harus memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, maka pengeluaran pemerintah harus dijadikan sebagai faktor penentu. Hubungan timbal balik seperti yang dijelaskan di atas secara teoritis bisa

saja terjadi. Namun dalam kenyataannya sering kali hubungan yang terjadi hanya satu arah.

PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara ?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan mengubah-ubah anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah¹ (Rahardja dan Manurung, 2008). Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah² (Djojosubroto dan Iskandar, 2004).

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah erat kaitannya dengan pajak. Tarif pajak yang berlaku berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Jika tarif pajak diturunkan maka daya beli masyarakat akan meningkat dan industri juga akan meningkatkan outputnya secara umum.

Menurut Rahardja, Manurung (2008), perbandingan nilai penerimaan (T) dan pengeluaran (G), politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbangan dan anggaran berimbang. Hasil yang dicapai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan. $\Delta Y = \Delta G / (1-b)$. sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan, $\Delta Y = -b\Delta T / (1-b)^3$.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli

barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.⁴ (Mangkoesoebroto, 2003).

Keputusan Menteri No. 29/2002 menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah provinsi/ pemerintah pusat). Pada prakteknya pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sejak tahun 2010 format Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengubah penggunaan istilah pengeluaran rutin menjadi pengeluaran aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan menjadi pengeluaran pelayanan publik. Penelitian ini mengasumsikan bahwa pengeluaran aparatur daerah dan pengeluaran pelayanan publik sama dengan pengeluaran rutin dan pengeluaran pelayanan publik. Penjelasan terkait pengeluaran aparatur daerah dan pengeluaran pelayanan publik sebagai berikut :

1. Pengeluaran Aparatur Daerah

Pengeluaran Aparatur Daerah yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain.⁵

2. Pengeluaran Pelayanan Publik

Pengeluaran pelayanan publik yaitu pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan prasarana fisik maupun non fisik, seperti jalan, jembatan, kendaraan, gedung, dan lain-lain yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran. Pengeluaran pelayanan publik ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi yang kemudian dialokasikan pada berbagai bidang yang sudah diprioritaskan.

Kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam memiliki prinsip untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan sosial dan ekonomi harus sesuai dengan kerangka umum hukum islam seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan

Sunnah. Pengeluaran pemerintah sudah diatur dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Sebagai suatu panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran islam memakai kaidah-kaidah yang diambil dari *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* guna menghindari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan juga norma-norma konsumsi Islam, dan dijadikan kaidah rasionalitas bagi pengeluaran negara. Enam kaidah tersebut adalah.⁶

1. Kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
2. Penghapusan kesulitan dan kerugian harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan.
3. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kemaslahatan minoritas yang lebih sedikit.
4. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.
5. Siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya.
6. Sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor lainnya tidak dapat dibangun, maka menengakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi islam dapat dibagi menjadi tiga bagian.⁷

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.

3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dengan dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu (tahun dasar). Perhitungan PDRB atas dasar konstan saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional dan didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan yakni produksi, pendapatan dan pengeluaran. Nilai PDRB akan sama meskipun dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan.

PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi penulis, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan analisis penerimaan pajak daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian, antara lain :

Abustan dan Mahyudin (2009), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis *Vector Auto Regressive* (VAR) terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan kausalitas antara PDRB dan APBD hanya satu arah yakni PDRB sebagai determinan terhadap APBD dan tidak sebaliknya.

Manik dan Hidayat melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara”. Tujuan penelitian ini yaitu melihat apakah terdapat hubungan kointegrasi dan hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama kurun waktu 1972-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik (kausalitas) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tidak ditemukan, tetapi hanya hubungan searah, yakni pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Rahayu (2011), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran aparatur daerah dan pengeluaran pelayanan publik memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diwakili oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dikumpulkan secara *times series* dengan rentang waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Vector Autoregression (VAR)

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Vector Autoregression* (VAR). Model VAR dibangun untuk mengatasi sulitnya memenuhi identifikasi dari *super exogeneity* dimana hubungan antar variabel ekonomi dapat tetap diestimasi tanpa perlu menitikberatkan masalah eksogenitas.⁸ Dalam pendekatan ini semua variabel dianggap sebagai endogen dan estimasi dapat dilakukan secara serentak atau sekuensial.

Kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini di uji VAR dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{LogEXPD}_t = a_{10} + a_{11} \text{LogEXPD}_{t-j} + a_{12} \text{LogPDRB}_{t-j} + e_{1t} \quad (1)$$

$$\text{LogPDRB}_t = a_{20} + a_{21} \text{LogPDRB}_{t-j} + a_{22} \text{LogEXP}_{t-j} + e_{2t} \quad (2)$$

Keterangan :

- PDRB_t = PDRB pada tahun t
- PDRB_{t-j} = PDRB pada tahun t-j
- EXPD_t = Pengeluaran pemerintah pada tahun t
- EXPD_{t-j} = Pengeluaran pelayanan publik pada tahun t-j
- a₁₀, a₂₀ = Konstanta
- e_{1t}, e_{2t} = Faktor gangguan

Impulse Response Function (IRF)

IRF melakukan penelusuran atas dampak suatu guncangan (*shock*) terhadap suatu variabel atau terhadap sistem (seluruh variabel) sepanjang waktu tertentu.⁹

Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Variance decomposition berguna untuk memprediksi kontribusi prosentase varian setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu di dalam sistem VAR.¹⁰

HASIL PENELITIAN

Hasil Estimasi Vector Autoregression (VAR)

Sebelum dilakukan estimasi VAR, telah dilakukan uji stasioneritas, uji kointegrasi dan penentuan lag optimal. Hasil uji stasioner menunjukkan semua data stasioner pada *first difference* maka semua data tersebut telah diubah terlebih dahulu ke bentuk *first difference*. Hasil uji estimasi VAR ditunjukkan oleh tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Hasil Estimasi Vector Autoregression

	DEXPD	DPDRB
DEXPD(-1)	0.385791 (0.32928) [1.17163]	0.067488 (0.04318) [1.56307]
DPDRB(-1)	2.090125 (1.06711) [1.95867]	0.796132 (0.13993) [5.68966]
C	-12.72453 (6.54151) [-1.94520]	1.222908 (0.85776) [1.42570]
R-squared	0.881238	0.975641
Adj. R-squared	0.866393	0.972596
Sum sq. resids	0.318617	0.005478
S.E. equation	0.141115	0.018504
F-statistic	59.36176	320.4156
Log likelihood	11.87810	50.47846
Akaike AIC	-0.934537	-4.997732
Schwarz SC	-0.785415	-4.848610
Mean dependent	6.134930	7.924133
S.D. dependent	0.386065	0.111777
Determinant resid covariance (dof adj.)		2.24E-06
Determinant resid covariance		1.59E-06
Log likelihood		72.91793
Akaike information criterion		-7.043993
Schwarz criterion		-6.745749

Sumber : Data diolah

Estimation Proc:

LS 1 1 DEXPD DPDRB @ C

VAR Model:

$$\text{DEXPD} = C(1,1)*\text{DEXPD}(-1) + C(1,2)*\text{DPDRB}(-1) + C(1,3)$$

$$\text{DPDRB} = C(2,1)*\text{DEXPD}(-1) + C(2,2)*\text{DPDRB}(-1) + C(2,3)$$

VAR Model - Substituted Coefficients:

$$\text{DEXPD} = 0.385791450023*\text{DEXPD}(-1) + 2.09012489311*\text{DPDRB}(-1) - 12.724526928$$

$$\text{DPDRB} = 0.0674881933577*\text{DEXPD}(-1) + 0.796132441098*\text{DPDRB}(-1) + 1.22290805645$$

Berdasarkan hasil analisa *Vector Autoregresssion* (VAR) diketahui bahwa variabel sebelumnya juga berkontribusi terhadap variabel pada tahun sekarang sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 diatas bahwa variabel masa lalu (t-1) berkontribusi terhadap variabel itu sendiri dan variabel lain. Lag yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lag 1, yang berarti bahwa terdapat kontribusi masing-masing variabel terhadap variabel itu sendiri dan variabel lainnya, dengan demikian variabel dalam penelitian ini saling berkontribusi.

Impulse Response Funtion (IRF)

1. Response Function of EXPD

Hasil *response function* diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek (tahun ke 1) perubahan satu standar deviasi pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pengeluaran pemerintah itu sendiri yaitu sebesar 0.141 dan tidak direspon oleh PDRB dalam penelitian ini. Dalam jangka menengah (tahun ke 5), dimana perubahan satu standar deviasi pengeluaran pemerintah direspon pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 0.079, direspon positif terhadap perubahan PDRB sebesar 0.027. Dalam jangka panjang (tahun ke 10) perubahan satu standar deviasi pengeluaran pemerintah direspon pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 0.087, merespon positif terhadap perubahan PDRB sebesar 0.030.

2. *Response Function of PDRB*

Hasil *response function* diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek (tahun ke 1) perubahan satu standar deviasi PDRB terhadap perubahan PDRB itu sendiri yaitu sebesar 0.010 dan merespon positif terhadap perubahan pengeluaran pemerintah sebesar 0.015. Dalam jangka menengah (tahun ke 5), dimana perubahan satu standar deviasi PDRB direspon PDRB itu sendiri sebesar 0.024 dan merespon positif terhadap perubahan pengeluaran pemerintah sebesar 0.008. Dalam jangka panjang (tahun ke 10) perubahan satu standar deviasi PDRB direspon PDRB itu sendiri sebesar 0.026, merespon positif terhadap perubahan pengeluaran pemerintah sebesar 0.009.

Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

1. *Forecast Error Variance Decomposition of EXPD*

Variance decomposition pengeluaran pemerintah diketahui bahwa dalam jangka pendek (tahun ke 1), variasi perubahan pengeluaran pemerintah dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 100 persen, sedangkan PDRB tidak merespon sama sekali, dimana respon PDRB baru muncul pada tahun kedua. Dalam jangka menengah (tahun ke 5) perubahan pada pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 94.43 persen dan PDRB sebesar 5.56 persen. Dalam jangka panjang (tahun ke 10) perubahan pada pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 91.99 persen dan PDRB sebesar 8 persen.

2. *Forecast Error Variance Decomposition of PDRB*

Variance decomposition PDRB diketahui bahwa dalam jangka pendek (tahun ke 1), variasi perubahan PDRB dijelaskan oleh PDRB itu sendiri sebesar 32.89 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah merespon sebesar 67.10 persen. Dalam jangka menengah (tahun ke 5) perubahan pada PDRB dipengaruhi oleh PDRB itu sendiri sebesar 14.25 persen dan pengeluaran pemerintah sebesar 85.74 persen. Dalam jangka panjang (tahun ke 10) perubahan pada PDRB dipengaruhi oleh PDRB itu sendiri sebesar 12.39 persen dan pengeluaran pemerintah sebesar 87.60 persen.

PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi VAR menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) signifikan terhadap PDRB itu sendiri. Dengan nilai t-statistik sebesar 5.68966 signifikan karena lebih besar dari t-tabelnya yaitu 1.725. Implikasi dari hasil estimasi VAR ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan terhadap PDRB periode sebelumnya sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan PDRB sebesar 0.796132.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB tetapi tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan 1 persen pada pengeluaran pemerintah tidak akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap PDRB. Pengeluaran pemerintah tidak signifikan terhadap PDRB disebabkan variabel tersebut tidak secara langsung mempengaruhi PDRB. Misalnya, pengeluaran pemerintah yang tinggi didominasi pengeluaran pelayanan publik untuk memperbaiki infrastruktur jalan maka kenaikan ini tidak serta merta langsung signifikan mempengaruhi PDRB tetapi butuh waktu yang lama dan bertahap untuk melihat pengaruhnya terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil estimasi VAR dalam Tabel 2 diketahui nilai *R-Squared* yang kurang dari 1, yaitu sebesar 0.975641. Hal ini berarti variabel persamaan dalam estimasi VAR dalam hasil uji tersebut sudah cukup baik.

2. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil estimasi VAR menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Dengan nilai t-statistik sebesar 1.95867 signifikan karena lebih besar dari t-tabelnya yaitu 1.725. Implikasi dari hasil estimasi VAR ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan terhadap PDRB periode sebelumnya sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 2.090125.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah itu sendiri tetapi tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan 1 persen pada pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya tidak akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah itu sendiri. Hal ini disebabkan besaran pengeluaran pemerintah tidaklah ditentukan

berdasarkan pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya tetapi ditentukan berdasarkan kebutuhan, skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil estimasi VAR dalam Tabel 2 diketahui nilai *R-Squared* yang kurang dari 1, yaitu sebesar 0.881238. Hal ini berarti variabel persamaan dalam estimasi VAR dalam hasil uji tersebut sudah cukup baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pengaruh pengeluaran pemerintah semakin besar dalam jangka panjang.
2. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, pengaruh variabel tersebut baru muncul pada tahun kedua hingga jangka panjang dengan persentase yang sangat kecil.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya proporsi pengeluaran aparaturnya dikurangi dan dialihkan untuk pengeluaran pelayanan publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam jangka panjang.
2. Untuk peneliti yang tertarik melakukan kajian dibidang yang sama hendaknya menambahkan rentang waktu penelitian dan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan dan Mahyudin. 2009. *Analisis Vector Auto Regressive (VAR) terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005.*

<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/74/01-Abustan.pdf?sequence=1> [10 april 2014]

- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika, Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Erlangga, Jakarta.
- BPS. 2004. *Sumatera Utara Dalam Angka Tahun. Berbagai Edisi*. Badan Pusat Statistik, Medan.
- Djojosebroto, Dono Iskandar. 2004. *Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia, Dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan implementasi*. Eds. Heru Subiantoro dan Singgih Riphath. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Manik, Rikwan E.S dan Hidayat Paidi. *Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. FE USU, Medan.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik*. Edisi keduabelas. BPFE, Yogyakarta.
- Edwin, Mustafa, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana, Jakarta.
- Rahardja Prathama dan Manurung Mandala. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahayu, Sri Endang. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*. Jurnal Manajemen & Bisnis UMSU Vol 11 No. 2 Tahun 2011, Medan.
- Umer Chapra. 2000. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, Jakarta.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika, Pengantar dan Aplikasinya*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Catatan :

¹ Rahardja dan Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008).

² Djojosebroto, Dono Iskandar, *Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia, Dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan implementasi*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004).

³ Op.Cit.

⁴ Mangkoesebroto, Guritno, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta : BPFE, 2010).

⁵ Rahayu, Sri Endang, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*. (Medan : Jurnal Manajemen & Bisnis UMSU Vol 11 No. 2 Tahun 2011, 2011).

⁶ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, 2000).

⁷ Edwin, Mustafa, dkk, . *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007).

⁸ Ariefianto, Moch. Doddy, *Ekonometrika, Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. (Jakarta : Erlangga, 2012).

⁹ Ibid.

¹⁰ Widarjono, Agus, *Ekonometrika, Pengantar dan Aplikasinya*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2013).

